

**IMPLEMENTASI PROGRAM NAGARI BINAAN KERJASAMA
RANTAU OLEH BIRO KERJASAMA, PEMBANGUNAN DAN RANTAU
DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

TESIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar Magister
Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Andalas*



**PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2021

ABSTRAK

Miftahul Viona Sari, No BP 2020841003, Implementasi Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau Oleh Biro Kerjasama, Pembangunan Dan Rantau Di Provinsi Sumatera Barat Jurusan Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2021, Dibimbing oleh : Dr. Syamsurizaldi, S.I.P., S.E., M.M., dan Dr. Hendri Koeswara, S.I.P., M.Soc., Sc. Tesis ini terdiri dari 150 halaman dengan referensi 13 buku teori, 4 buku metode, 2 skripsi, 9 jurnal, 6 peraturan, dan 1 website internet.

Keberadaan potensi rantau dalam pembangunan sebagai sebuah keunikan direspon secara khusus oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan kebijakan yaitu membentuk Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau pada tahun 2017 dan mengadakan Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau di seluruh Kabupaten/Kota sejak tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kinerja kebijakan dari Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau di Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan acuan teori Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antara organisasi, karakteristik agen pelaksana, sikap agen pelaksana, dan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Melalui analisis terhadap variable-variabel implementasi kebijakan tersebut akan tergambar bagaimana kinerja kebijakan dari Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dan validitas data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang membuat kinerja dari Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau menjadi terhambat yaitu tidak adanya aturan yang dapat menjadi pedoman yang dikeluarkan oleh Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau untuk pelaksanaan Program, adanya keterbatasan sumber daya manusia ditandai dengan tidak adanya OPD khusus yang menangani Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau di level kabupaten/kota, tidak tersedianya anggaran di kabupaten dan Nagari, banyaknya *stakeholder* yang terlibat sehingga terjadinya distorsi komunikasi yang menyebabkan pemahaman *stakeholder* mengenai ukuran dan tujuan kebijakan menjadi berbeda-beda, serta kondisi lingkungan eksternal yaitu lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif juga turut menyebabkan pelaksanaan Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau menjadi tidak optimal. Pada Tahun 2019 juga terjadi perubahan regulasi dimana mulai Tahun 2021 implementor Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau yang awalnya di Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau dipindahkan ke Badan Penghubung Sumatera Barat di Jakarta. Selain itu, karena Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau merupakan program pertama yang baru dijalankan menyebabkan dalam pelaksanaannya masih mencari pola atau model yang tepat agar tercapai kinerja kebijakan yang optimal.

Kata kunci: Implementasi Program, Nagari Binaan, Rantau

ABSTRACT

Miftahul Viona Sari, No BP 2020841003, Implementation of the Nagari Binaan Kerjasama Rantau Program by Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau of West Sumatra Province of West Sumatra Province. Master of Public Administration Department, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2021, Supervised by : Dr. Syamsurizaldi, S.IP., S.E., M.M and Dr. Hendri Koeswara, S.IP., M.Soc., Sc. This thesis consists of 150 pages with references to 13 theory books, 4 method books, 2 theses, 9 journals, 6 regulations, and 1 internet website.

The existence of Perantau in regional development as a uniqueness was specifically responded to by the West Sumatra Provincial Government with the policy of establishing a Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau in 2017 and holding the Nagari Binaan Kerjasama Rantau Programme in all districts/cities since 2018. This study aims to identify and analyze the policy performance of the Nagari Binaan Kerjasama Rantau Programme in West Sumatra Province by using the theoretical reference of Policy Implementation from Van Meter and Van Horn consisting of Standards and Objectives, Resources, Interorganizational communication, Characteristic of The Implementing Agencies, The Disposition Of Implementors, and Economic, Social, dan Political Conditions. Through an analysis of the variables of policy implementation, it will be illustrated how the policy performance of the Nagari Binaan Kerjasama Rantau Programme will be. Data were collected through interviews, documentation, and observation and analyzed qualitatively with a descriptive approach. Selection of informants using purposive sampling technique and data validity using source triangulation.

The results showed that several factors that hampered the performance of the Nagari Binaan Kerjasama Rantau Programme, namely the absence of rules that could serve as guidelines issued by the Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau for Program implementation, the limited human resources marked by the absence of special OPDs. which handles the Nagari Program Assisted by Overseas Cooperation at the district/city level, the unavailability of budgets in the districts and Nagari, the large number of stakeholders involved so that communication distortions occur which cause the understanding of stakeholders regarding the size and objectives of policies to be different, as well as external environmental conditions, namely the social environment. Unfavorable economic and political conditions also contributed to the suboptimal implementation of the Nagari Binaan Kerjasama Rantau Programme. In 2019 there was also a change in regulations where starting in 2021 the implementer of the Nagari Binaan Kerjasama Rantau Programme which was originally at the Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau was transferred to the Badan Penghubung Sumatera Barat in Jakarta. In addition, because the Nagari Binaan Kerjasama Rantau Programme is the first program that has just been implemented, in its implementation it is still looking for the right pattern or model in order to achieve optimal policy performance.

Keywords: Program Implementation, Nagari Binaan, Rantau